



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan berakhirnya periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 maka disusunlah Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.

Rencana Strategis ini disahkan dan ditetapkan sebagai Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, selanjutnya dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di sektor kelautan dan perikanan agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Demak, pelaku usaha dan seluruh *stakeholder* yang berkepentingan.

Demak, 4 September 2025
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Demak



Ir. Nanang Tasunar D.N, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 196702101993031009

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	 II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak	II-8
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak	II-20
2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-32
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-33
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	II-33
2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya	II-35
2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan	II-46

BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
	3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
	3.2. Strategi dan Kebijakan	III-3
	3.2.1. Strategi	III-3
	3.2.2. Kebijakan	III-4
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
	4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD	IV-1
	4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati	IV-1
	4.1.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	IV-7
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-24
BAB V	PENUTUP	V-1
	5.1. Penutup	V-1

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Kelautan dan Perikanan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu

tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB 2

**GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Demak dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan memerlukan dukungan penuh dari semua organisasi Perangkat Daerahnya, termasuk pula dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sebagai unsur Perangkat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya di subsektor perikanan yang merupakan bagian dari sektor pangan. Bertanggungjawab atas segala capaian kinerja pembangunan subsektor kelautan dan perikanan periode sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan subsektor kelautan dan perikanan saat ini dan perencanaan pengembangan subsektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari elemen Pemerintah Kabupaten Demak, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak harus memprioritaskan program dan kegiatannya pada peningkatan kualitas, kuantitas, mutu, konsistensi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan, pembudidaya, nelayan perairan umum dan pengolah hasil perikanan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Demak Nomor 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

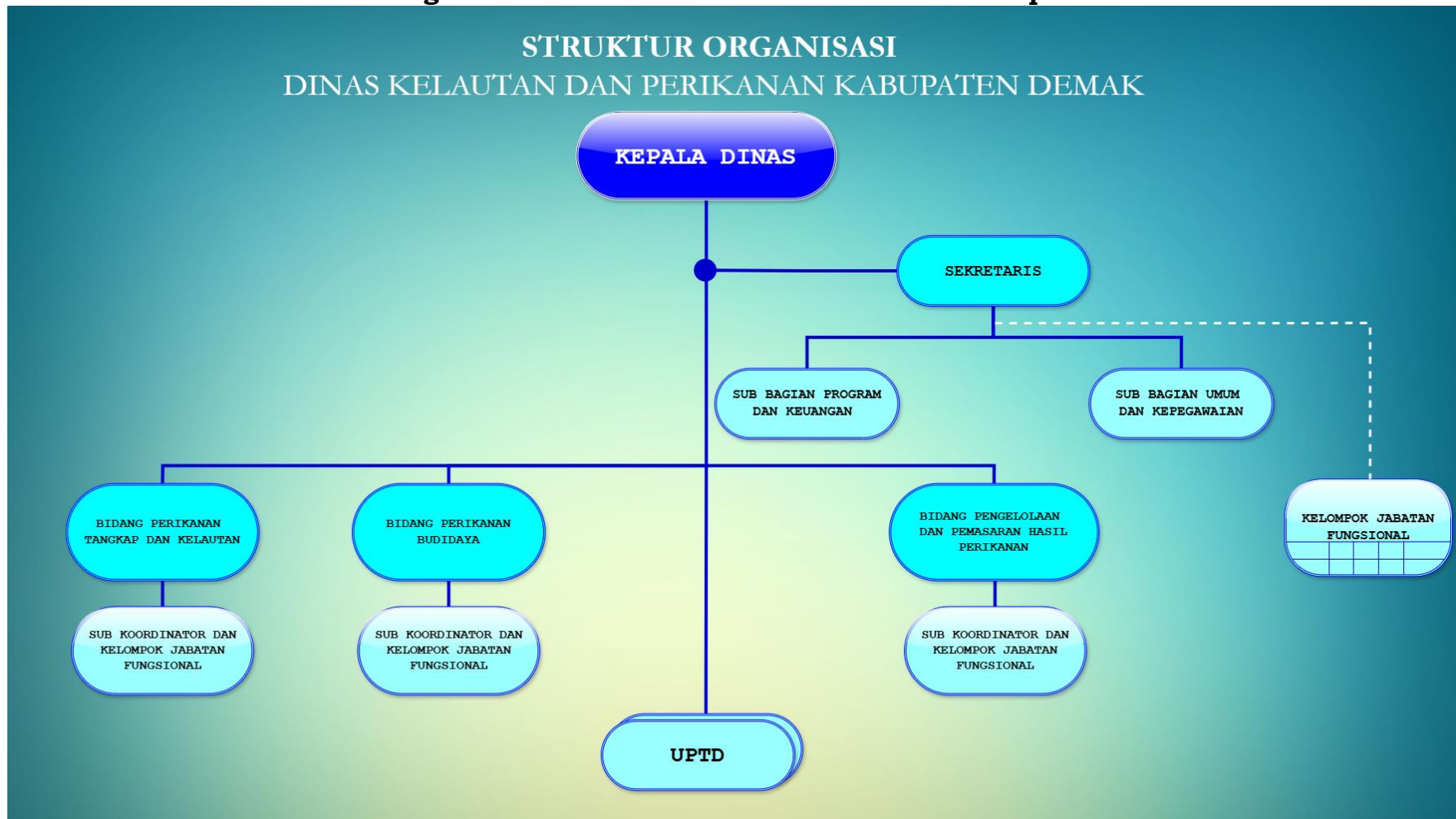
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan, pembidangan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak



Sumber : Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Uraian tugas jabatan struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
 - d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

- 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan program dan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang program dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program dan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan keuangan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program dan keuangan;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang program dan keuangan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

3. Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut, serta Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan Ikan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di Bidang Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan Ikan; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pengembangan Sarana Prasarana Nelayan dan Masyarakat Pesisir serta Penegakan Aturan Penangkapan Ikan dan Mitigasi Bencana Pesisir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, melaksanakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Nelayan dan Masyarakat Pesisir;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penegakan Aturan Penangkapan Ikan dan Mitigasi Bencana Pesisir; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengolahan dan Mutu Hasil

Perikanan, Pemasaran dan Promosi Hasil Perikanan, serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk Perikanan

(2) Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemasaran dan Promosi Hasil Perikanan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk Perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor perikanan dapat dianalisis dari sumber daya aparatur (SDM) dan asset/modal

yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.

a. Sumberdaya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang berkuantitas dan berkualitas sesuai dengan bidangnya.

Sumberdaya manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak diklasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan dan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		NonASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-	-	0
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	1	-	1
2	SMA Sederajat	-	-	2	-	5	-	7
3	D3	-	-	-	-	-	-	0
4	S1	5	4	5	6	5	3	28
5	S2	3	3	-	-	-	-	6
6	S3	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah							42

Sumber: Umum dan Kepegawaian Dinlutkan Demak, 2025

Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak memiliki 42 Pegawai terdiri dari 15 PNS, 13 PPPK dan 14 Non ASN, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN	11	3	14
2	PPPK	7	6	13
3	PNS Golongan II	-	-	0
4	PNS Golongan III	5	6	11
5	PNS Golongan IV	3	1	4
	Jumlah			42

Sumber: Umum dan Kepegawaian Dinlutkan Demak, 2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak berasal dari APBD dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengada an	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah kantor Dinlutkan	751	2018	Jln. Sultan Hadi Wijaya No.53 Mangunjiwan Demak	Pakai	20/05/ 2021	00230	Kantor	Pemb elian	154.000.000	Tanah kantor Dinlutkan 2018
2	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	8.194	1988	Ds. Buko	Pakai	21/07/ 1988	2	Tempat Pelelangan Ikan	Pemb elian	210.870.000	Tanah PPI Buko
3	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	529	1978	Ds. Bungo Kec. Wedung	Pakai	29/08/ 1978	1	Tempat Pelelangan Ikan	Pemb elian	7.935.000	Tanah TPI
4	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	1.065	2001	Ds. Purworejo Kec. Bonang	Pakai	22/03/ 2001	04	Tempat Pelelangan Ikan	Pemb elian	25.130.000	Tanah TPI Purworejo
5	Tanah Tambak/Empan g/Kolam Ikan/Akuarium	971	1979	BBi Bintoro	Pakai	08/09/ 1979	11	Kolam Perikanan	Pemb elian	19.420.000	Kolam BBI Bintoro
6	Tanah Hutan lainnya	30.000	1999	Ds.Morodemak	Pakai	22/07/ 1999	02	Tanah penghijau an	Pemb elian	300.000.000	Penghijauan Pohon Bakau

Sumber: Umum dan Kepegawaian Dinlutkan Demak, 2025

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	433	Jl Sultan Hdiwijaya No. 53	433	Tanah Milik Pemda	Hibah	463.228.980
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	42	BBi Bintoro	42	Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.060.000
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	50	PPI Wedung	50	Tanah Milik Pemda	Pembelian	198.284.000
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	20	TPI Bungo	20	Tanah Milik Pemda	Hibah	35.460.000
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	250	PPP Purworejo	250	Tanah Hak Lainnya	Hibah	433.610.000
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	75	PPI Bungo Kec. wedung	75	Tanah Milik Pemda	Pembelian	134.473.310
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	100	PPP Morodemak	100	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	199.944.090
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	10	BBi Kampung Sempal Wadak	10	Tanah Milik Pemda	Pembelian	99.540.000

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				Bintoro Demak				
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	10	Jalan Diponegoro No 1 Demak	10	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	35.585.580
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	72	BBI Sempal Wadak	72	Tanah Milik Pemda	Pembelian	125.228.000
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	30	BBI Bintoro	30	Tanah Milik Pemda	Pembelian	33.419.000
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	21	BBI Bintoro	21	Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.157.000
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	36	BBI Bintoro	36	Tanah Milik Pemda	Pembelian	111.752.280
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	45	BBI Bintoro	45	Tanah Milik Pemda	Pembelian	112.189.440
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	987	BBI Bintoro	987	Tanah Milik Pemda	Pembelian	431.382.960
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	40	BBI Bintoro	40	Tanah Milik Pemda	Pembelian	89.280.000
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	652	PPP Morodemak	652	Tanah Hak Lainnya	Hibah	319.433.630

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
18	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	B	5	PPI Wedung	5	Tanah Milik Pemda	Hibah	9.867.775
19	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	B	48	PPP Morodemak	48	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	167.782.360
20	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	B	500	PPI Wedung	500	Tanah Milik Pemda	Pembelian	885.038.000
21	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	B	94	BBi Bintoro	94	Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.474.000
22	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	B	100	BBi Bintoro	100	Tanah Milik Pemda	Pembelian	130.680.000
23	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	B	134	Ds.Wonosari	134	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	673.272.770
24	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	B	42	BBi Bintoro	42	Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.686.000
25	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	B	25	PPI Wedung	25	Tanah Milik Pemda	Pembelian	69.884.000

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
26	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	42	PPI Wedung	42	Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.593.000
27	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	50	BBI Bintoro	50	Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.995.000
28	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	50	PPI Wedung	50	Tanah Milik Pemda	Pembelian	201.841.540
29	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	36	Jln. Sultan Hadiwijaya Mangunjiwan Demak	36	Tanah Milik Pemda	Hibah	96.700.000
30	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	B	100	PPP Morodemak	100	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	548.047.700
31	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	B	60	PPI Wedung	60	Tanah Milik Pemda	Pembelian	245.927.000
32	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	B	50	Wedung	50	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	98.481.000

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
33	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	B	49	Jl.Diponegoro	49	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	381.472.560
34	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	B	72	TPI Morodemak	72	Tanah Milik Pemda	Pembelian	169.534.070
35	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	B	140	TPI Morodemak	140	Tanah Milik Pemda	Pembelian	206.111.590
36	Gedung Pos Jaga Permanen	B	6	PPP Morodemak	6	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	14.960.000
37	Gedung Pos Jaga Permanen	B	15	PPP Morodemak	15	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	100.806.000
38	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	B	100	PPI Wedung	100	Tanah Milik Pemda	Pembelian	205.460.240
39	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	75	PPP Morodemak	75	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	100.834.000
40	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	180	Ds. Wonosari	180	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	885.212.000
41	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	34	Ds. Wonosari	34	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	102.048.700

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
42	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	5000	Ds. Wonosari	5000	Tanah Hak Lainnya	Hibah	1.491.043.000
43	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	250	Ds. Purworejo	250	Tanah Milik Pemda	Hibah	1.463.590.000
44	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	100	Ds. Wonosari	100	Tanah Hak Lainnya	Hibah	771.735.000
45	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	100	Ds. Wonosari	100	Tanah Hak Lainnya	Hibah	801.280.000
46	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	250	Ds. Purworejo	250	Tanah Milik Pemda	Hibah	1.754.481.000
47	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	100	Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam	100	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	423.623.620
48	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	B	36	Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam	36	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	413.370.000
49	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	200	PPI Wedung	200	Tanah Milik Pemda	Pembelian	109.569.700

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
50	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	500	Ds. Wonosari	500	Tanah Milik Pemda	Pembelian	228.490.300
51	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	B	100	PPP Morodemak	100	Tanah Milik Pemda	Pembelian	109.506.000
52	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	B	18	BBI KAMPUNG SEMPAL WADAK BINTORO DEMAK	18	Tanah Milik Pemda	Pembelian	34.805.000
53	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)	B	84	BBI Bintoro	84	Tanah Milik Pemda	Pembelian	176.428.000
54	Pagar Permanen	B	150	PPI wedung	150	Tanah Milik Pemda	Pembelian	143.608.000
55	Pagar Permanen	B	30	Ds. Wedung	30	Tanah Milik Pemda	Pembelian	39.090.000
56	Pagar Permanen	B	12,75	BBI Bintoro	12,75	Tanah Milik Pemda	Pembelian	34.905.000
57	Pagar Permanen	B	100	BBI Bintoro	100	Tanah Milik Pemda	Pembelian	99.800.000
58	Pagar Permanen	B	45	PPI Wedung	45	Tanah Milik Pemda	Pembelian	54.345.000

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
59	Pagar Permanen	B	500	PPI Wedung	500	Tanah Milik Pemda	Pembelian	526.043.700
60	Pagar Permanen	B	800	PPP Morodemak	800	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	280.297.000
61	Pagar Permanen	B	13,5	BBI Bintoro	13,5	Tanah Milik Pemda	Pembelian	55.688.620
62	Pagar Permanen	B	70	BBI Bintoro	70	Tanah Milik Pemda	Pembelian	101.086.150
63	Pagar Permanen	B	25	PPI Wedung	25	Tanah Milik Pemda	Pembelian	79.514.000
64	Pagar Permanen	B	100	BBI Bintoro	100	Tanah Milik Pemda	Pembelian	96.590.000
65	Pagar Permanen	B	10	TPI Morodemak	10	Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.586.000

Sumber: Umum dan Kepegawaian Dinlutkan Demak, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.

a. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Kabupaten Demak memiliki prospek pengembangan kelautan dan perikanan yang sangat besar karena wilayahnya di daerah Pantai Utara (Pantura) dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Demak terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, wisata bahari dan potensi mangrove. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rajungan, ikan dan biota laut ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan. Secara rinci capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025) TW 1	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	84,7	85	91,5	88,00	88,50	92,02	91,49	91,56	N/A	N/A	108,64	107,64	100,07	-	-
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100,00	100,00	100,00	100	-
3	Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	-	-	78,86	78,93	79,25	79,25	80,04	77,91	79,26	79,26	N/A	N/A	98,80	100,42	100,01	-	-
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100,00	100,00	100,00	100	-
5	Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan	%	-	-	4,87	4,9	5,25	4,92	4,93	7,45	5,24	5,66	N/A	N/A	152,98	106,94	107,81	-	-
6	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	%	-	-	7,41	7,5	8,6	8,60	9,00	7,44	8,1	8,6	N/A	N/A	100,40	108,00	100,00	-	-
7	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	-	-	50.876	53.370	58.287	58.7398	61.625	57.301	57.901	59.950	16.371	N/A	112,63	108,49	102,85	2,78	-

Sumber: Analisis DINLUTKAN Kabupaten Demak, 2025

Berdasarkan pelayanan yang telah diberikan, perlu suatu tolak ukur keberhasilan kinerja pelayanan yang terukur dan mampu merepresentasikan keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Adapun capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak pada tahun 2021-2026 sebagaimana yang disajikan pada tabel 2.5.

Pada tahun 2022 realisasi tujuan meningkatkan pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92,02 dari target kinerja sebesar 84,7 dengan rasio capaian kinerja sebesar 108,64%. Pada Tahun 2023 realisasi sebesar 91,49 dari target 85 dengan capaian kinerja sebesar 107,64%. Tahun 2024 realisasi sebesar 91,56 dari target sebesar 91,5 dengan capaian kinerja sebesar 100,07%. Selama tahun 2022-2024 capaian kinerja tujuan Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada dinas Kelautan dan Perikanan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung ketercapaian kinerja Meningkatkan pelayanan publik antara lain:

1. Pengelolaan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dalam pelayanan;
2. Responsibilitas dalam menangani pengaduan masyarakat, serta kemudahan akses pengaduan dan konsultasi layanan;
3. Petugas memberikan pelayanan dengan baik, ramah.

Pada tahun 2022-2024 sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti terealisasi sebesar 100% dari target kinerja sebesar 100% dengan rasio capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2022-2024 sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan indikator Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Dinas Kelautan dan Perikanan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung ketercapaian kinerja Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif antara lain:

1. Saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat (melalui media sosial, website dan email dinas);
2. Responsibilitas dalam penanganan pengaduan dan konsultasi layanan.

Pada tahun 2022 realisasi tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 77,91 dari target kinerja sebesar 78,86 dengan rasio capaian kinerja sebesar 98,80 %. Pada Tahun 2023 realisasi sebesar 79,26 dari target 78,93 dengan capaian kinerja sebesar 100,42%. Tahun 2024 realisasi sebesar 79,26 dari target sebesar 79,25 dengan capaian kinerja sebesar 100,01%. Selama tahun 2022-2024 capaian kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung ketercapaian kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Adanya perbaikan pada sistem akuntabilitas kinerja (perbaikan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja);
2. Kompetensi tenaga pengelola SAKIP telah cukup memadai;
3. Komitmen Kepala Dinas cukup kuat;
4. Komunikasi dan koordinasi antar lintas sektor sudah cukup baik.

Pada tahun 2022-2024 realisasi capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai target sebesar 100% dari target kinerja sebesar 100% dengan rasio capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2022-2024 capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencapai target telah mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung ketercapaian kinerjanya antara lain:

1. Telah adanya perencanaan yang baik;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak.

Pada tahun 2022 realisasi tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan dengan indikator LPE Sub kategori perikanan sebesar 7,45% dari target kinerja sebesar 4,87% dengan rasio capaian kinerja sebesar 152,98 %. Pada Tahun 2023 realisasi sebesar 5,24% dari target 4,9% dengan capaian kinerja sebesar 106,94%. Tahun 2024 realisasi sebesar 5,66 dari target sebesar 5,25 dengan capaian kinerja sebesar 107,81%. Selama tahun 2022-2024 capaian kinerja Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Sektor Perikanan dengan indikator LPE Sub kategori perikanan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung ketercapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Penerapan teknologi perikanan yang lebih baik;
2. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan;
3. Ketersediaan sarana prasarana perikanan yang memadai.

Pada tahun 2022 realisasi sasaran Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan indikator Peningkatan Omset UKM Pengolahan Hasil Perikanan sebesar 7,44% dari target kinerja sebesar 7,41% dengan rasio capaian kinerja sebesar 100,40 %. Pada Tahun 2023 realisasi sebesar 8,1% dari target 7,5% dengan capaian kinerja sebesar 108,00%. Tahun 2024 realisasi sebesar 8,6 dari target sebesar 8,6 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selama tahun 2022-2024 capaian kinerja Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung ketercapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Meningkatnya diversifikasi usaha pengolahan ikan;
2. Meluasnya akses pemasaran produk perikanan;
3. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan mulai meningkat;
4. Mudahnya akses perijinan untuk usaha pengolahan ikan.

Pada tahun 2022 realisasi sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan dengan indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya sebesar 57.301 ton dari target kinerja sebesar 50.876 ton dengan rasio capaian kinerja sebesar 112,63%. Pada Tahun 2023 realisasi sebesar 57.901 ton dari target 53.370 ton dengan capaian kinerja sebesar 108,49%. Tahun 2024 realisasi sebesar

59.950 ton dari target sebesar 58.287 ton dengan capaian kinerja sebesar 102,85%. Selama tahun 2022-2024 capaian kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Tangkap dan Kelautan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung ketercapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Meningkatnya sarana prasarana usaha perikanan;
2. Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha;
3. Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha perikanan;
4. Meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha perikanan.

Kabupaten Demak memiliki prospek pengembangan kelautan dan perikanan yang sangat besar karena wilayahnya di daerah Pantai Utara (Pantura) dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Demak terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, wisata bahari dan potensi mangrove. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rajungan, ikan dan biota laut ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil interpretasi ini ditunjukkan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025) TW 1	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025) TW 1	V (2026)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.943.190.882	8.181.495.985	9.310.841.500	10.392.716.330	13.547.267.098	10.968.241.170	7.848.188.080	8.498.494.079	1.220.446.407	N/A	91,84	95,93	91,28	11,74	-	0,06	-0,10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.838.354.882	3.951.625.500	4.920.237.136	5.761.343.800	5.148.507.602	3.497.330.447	3.853.457.385	4.713.622.568	903.843.207	N/A	91,12	97,52	95,80	15,69	-	0,09	0,16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	36.000.000	30.000.000	20.893.000	40.000.000	29.990.000	33.969.150	29.073.300	1.575.000	N/A	99,97	94,36	96,91	7,54	-	0,16	-0,01
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.180.094.782	2.944.808.100	3.663.991.500	4.761.923.800	4.163.247.502	2.859.541.752	2.876.359.816	3.510.227.279	816.400.300	N/A	89,92	97,68	95,80	17,14	-	0,09	0,11
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	14.000.000	13.000.000	10.000.000	25.000.000	0	13.300.500	12.657.000	0	N/A	-	95,00	97,36	0,00	-	0,40	-0,05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	190.000.000	93.000.000	190.500.000	205.000.000	0	187.784.746	92.370.355	0	N/A	-	98,83	99,32	0,00	-	0,27	-0,51
Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.000.000	278.469.900	228.200.000	199.420.000	229.000.000	223.013.596	271.972.250	216.652.860	27.812.600	N/A	96,54	97,67	94,94	13,95	-	0,01	0,01
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.190.100	118.500.000	511.998.850	57.107.000	150.190.100	4.156.000	114.525.000	484.091.300	0	N/A	99,19	96,65	94,55	0,00	-	7,84	14,89
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	136.000.000	115.847.500	111.000.000	129.000.000	100.000.000	128.652.099	108.588.647	105.688.295	23.544.677	N/A	94,60	93,73	95,21	18,25	-	-0,06	-0,09

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025) TW 1	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025) TW 1	V (2026)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemerintahan Daerah																	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.070.000	254.000.000	269.046.786	392.500.000	236.070.000	251.977.000	246.957.276	262.862.179	34.510.630	N/A	98,02	97,23	97,70	8,79	-	0,03	0,02
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.702.499.725	2.303.916.235	2.165.113.750	1.534.082.530	5.211.661.772	2.210.032.800	2.136.640.215	1.632.997.372	102.629.750	N/A	81,78	92,74	75,42	6,69	-	0,45	-0,13
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.382.500.000	1.613.766.235	1.001.000.000	1.175.732.530	3.860.000.000	1.890.914.100	1.477.556.075	986.717.700	102.629.750	N/A	79,37	91,56	98,57	8,73	-	0,43	-0,28
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0	200.000.000	300.000.000	160.450.000	500.000.000	0	196.184.600	288.533.442	0	N/A	-	98,09	96,18	0,00	-	0,56	0,47
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	319.999.725	490.150.000	864.113.750	197.900.000	851.661.772	319.118.700	462.899.540	357.746.230	0	N/A	99,72	94,44	41,40	0,00	-	0,95	0,11
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.125.700.000	865.000.000	936.007.900	1.925.270.000	1.268.370.028	1.116.658.220	813.941.750	913.272.409	60.203.450	N/A	99,20	94,10	97,57	3,13	-	0,15	-0,07
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	125.000.000	580.000.000	465.000.000	554.305.000	565.000.000	125.000.000	547.729.800	449.040.299	9.375.000	N/A	100,00	94,44	96,57	1,69	-	0,92	1,60
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.000.700.000	285.000.000	471.007.900	1.370.965.000	703.370.028	991.658.220	266.211.950	464.232.110	50.828.450	N/A	99,10	93,41	98,56	3,71	-	0,34	0,01

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025) TW 1	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025) TW 1	V (2026)	Angg aran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.276.636.275	1.060.954.250	1.289.482.714	1.172.020.000	1.918.727.696	4.144.219.703	1.044.148.730	1.238.601.730	153.770.000	N/A	96,90	98,42	96,05	13,12	-	0,01	-0,28
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	200.000.000	300.000.000	0	0	580.000.000	199.356.000	297.196.500	0	0	N/A	99,68	99,07	-	0	-	-0,25	-0,25
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	200.250.000	225.000.000	130.000.000	150.000.000	380.250.000	196.769.650	220.618.000	127.813.000	150.000.000	N/A	98,26	98,05	98,32	100	-	0,35	-0,15
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.876.386.275	535.954.250	1.159.482.714	1.022.020.000	958.477.696	3.748.094.053	526.334.230	1.110.788.730	3.770.000	N/A	96,69	98,21	95,80	0,37	-	0,03	0,13

Sumber: Analisis DINLUTKAN Kabupaten Demak, 2025

c. Kelompok sasaran pelayanan PD

Kelompok sasaran layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah masyarakat pembudidaya ikan baik yang sudah bergabung dalam POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan), nelayan yang sudah bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) kelompok pengolah dan pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) maupun yang belum bergabung.

d. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tidak melibatkan Mitra Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana utama. Pelaksanaan pelayanan seperti perizinan, pendampingan teknis, dan pengawasan sumber daya dikelola langsung oleh unit teknis dan fungsional di lingkungan Dinas.

e. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja PD

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tidak melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra dalam pelaksanaan layanan dan kegiatan utama. Dengan meniadakan peran BUMD sebagai pelaksana utama, Dinas dapat memfokuskan sumber daya, pengawasan, dan tanggung jawab kepada unit teknis dan fungsional internal.

f. Kerja sama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD

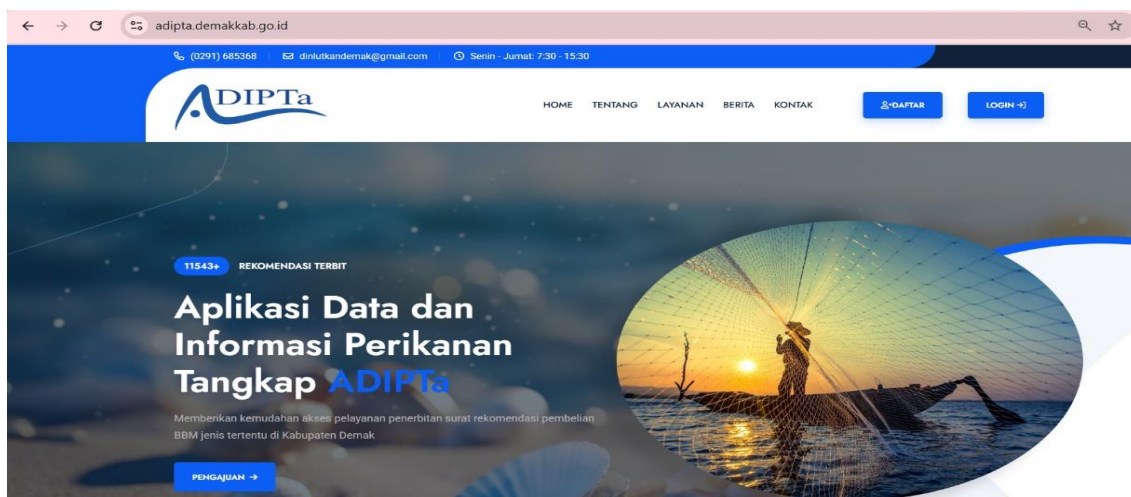
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak tidak melakukan kerja sama daerah (antara daerah atau dengan pihak ketiga) sebagai bagian dari tanggung jawab utama pelaksanaan program. Dengan kebijakan ini, semua kegiatan teknis dan pelayanan, mulai dari budidaya, pengawasan hingga pengolahan hasil perikanan, akan diorganisasi dan dikelola langsung oleh unit internal Dinas.

g. Inovasi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan inovasi yang dikembangkan atau diterapkan oleh Perangkat Daerah dalam periode lalu dengan penjelasan status (aktif/tidak aktif).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak melakukan inovasi mengembangkan sistem aplikasi bernama ADIPTA (Aplikasi Data dan Informasi Perikanan Tangkap) melalui Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nelayan dalam mengajukan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi. Nelayan dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi di rumah, tanpa harus datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Serta menekan penyalahgunaan, seperti misalnya upaya manipulasi data agar bisa membeli BBM bersubsidi meski sudah tidak memiliki kapal, karena akan mudah dideteksi.

Proses permohonan rekomendasi secara daring tersebut akan diproses maksimal lima hari sejak tanggal pengajuan. Persyaratan permohonan surat rekomendasi pembelian BBM yang harus disiapkan antara lain PAS (Surat Tanda Kebangsaan Kapal), *swapfoto* pemilik kapal, KTP, nomor induk berusaha (NIB), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), serta foto kapal dengan dilengkapi GPS (*Global Positioning System*) atau lokasi dan koordinat. Kedepannya aplikasi ini akan dikoneksikan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui Aplikasi XStar yang merupakan salah satu alat kontrol penggunaan BBM subsidi dan kompensasi negara agar tepat sasaran. Saat ini aplikasi tersebut dapat diakses melalui alamat website : <https://adipta.demakkab.go.id/>



Gambar 2.2 Laman Aplikasi Adipta

Sumber: <https://adipta.demakkab.go.id/>

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Dalam upaya pelaksanaan dan pengembangan program pembangunan sektor Perikanan, dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus dapat dipecahkan, antara lain :

- a. Adanya ancaman penyakit ikan;
- b. Meningkatnya harga input produksi (terutama pakan ikan) karena kebutuhan akan pakan mendominasi biaya produksi sampai dengan 70% dari total biaya produksi;
- c. Daya dukung dan kelestarian lingkungan tambak yang semakin menurun yang dapat berpengaruh pada produksi perikanan budidaya;
- d. Lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok karena sebagian besar kelompok pelaku usaha perikanan belum berbadan hukum atau belum ber SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sehingga menjadi kendala dalam penerimaan bantuan dari Pemerintah;
- e. Daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut yang semakin menurun yang dapat berpengaruh terhadap produksi perikanan tangkap;
- f. Terjadinya sedimentasi yang berpengaruh pada kesulitan kapal untuk masuk ke TPI, dan pendangkalan pada saluran tambak sehingga dapat berpengaruh pada produksi perikanan tangkap maupun budidaya;
- g. Tingginya abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Demak yang dapat menyebabkan kerusakan lahan tambak dan daratan sehingga mengancam keberadaan budidaya perikanan dan lingkungan masyarakat;
- h. Rendahnya SDM, kelembagaan kelompok dan penguasaan teknologi

bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan;

- i. Kebijakan impor garam yang dapat berpengaruh terhadap harga dan produksi garam dalam negeri;
- j. Standarisasi ekspor produk perikanan belum dapat dipenuhi oleh Produk Perikanan, sehingga menjadi kedepan menjadi tantangan untuk memperbaiki penanganan pasca panen produk perikanan; dan
- k. Perubahan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan menjadikan kewenangan daerah menjadi berkurang.

b. Peluang

Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut diatas Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa peluang, yaitu :

1. Adanya beberapa potensi jenis produk perikanan, seperti rajungan yang sudah diekspor, menjadi peluang untuk meningkatkan produksi dengan mempertimbangkan kelestarian alam;
2. Masih banyaknya tambak yang belum dimanfaatkan secara optimal dan lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan budidaya;
3. Kebutuhan permintaan pasar terhadap jenis komoditas tertentu (antara lain: lele, kakap, rajungan, bandeng, udang, garam beryodium) sangat besar menjadi peluang, untuk terus mengembangkan budidaya perikanan;
4. Adanya bantuan dan dana dari pemerintah pusat dalam tugas pembantuan, DAK, dan bantuan langsung dalam pengembangan sektor perikanan

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Demak menjadi awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih reliable dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, didasarkan pula pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak selama 5 (lima) tahun ke belakang.

Permasalahan utama pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yaitu: **“Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Sub Kategori Perikanan”**, yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Sub Kategori
Perikanan”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya peningkatan kualitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan potensi sumberdaya ikan dan pesisir	Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan/kelompok nelayan
		Masih rendahnya kesadaran pengurusan izin usaha perikanan tangkap
		Masih terbatasnya sarana prasarana pelabuhan perikanan
		Belum optimalnya jaminan perlindungan nelayan
		Kurangnya kualitas dan kuantitas benih dan induk bermutu
		Tingginya harga pakan
		Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan komoditas perikanan
		Masih terbatasnya perkembangan sentra komoditas perikanan

	Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi budidaya ikan
	Terbatasnya sarana prasarana penanganan hama penyakit ikan sesuai standar
	Masih rendahnya kesadaran pengurusan izin usaha perikanan budidaya
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
	Masih lemahnya kompetensi pengolah hasil perikanan
	Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan
	Banyaknya pengolah yang belum menerapkan sistem jaminan mutu
	Belum dijadikannya syarat wajib SNI bagi produk perikanan yang beredar di masyarakat

Sumber: Analisis DINLUTKAN Kabupaten Demak, 2025

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Menelaah isu-isu baik global maupun nasional yang ada dalam dokumen RPJMN yang dapat memengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bagian ini juga dijelaskan program-program dalam RPJMN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Visi pembangunan nasional adalah: " Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Agenda Pembangunan Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Misi agenda pembangunan yaitu:

- 1) Transformasi Sosial;
- 2) Transformasi Ekonomi;
- 3) Transformasi Tata Kelola;
- 4) Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepimpinan Indonesia;
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- 7) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- 8) Mewujudkan Berkesinambungan Pembangunan.

Kerangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dirumuskan lebih lanjut dalam 8 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Asta Cita), yaitu :

- 1) Asta Cita 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- 3) Asta Cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
- 4) Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
- 5) Asta Cita 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

- 6) Asta Cita 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- 7) Asta Cita 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
- 8) Asta Cita 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berdasarkan uraian Prioritas Pembangunan tersebut dapat dilihat keselarasan antara Misi Presiden dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Demak periode 2025-2029 yang sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Demak periode 2025-2029 ada pada **Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;** dan **Asta Cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;**

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran Pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Berikut sasaran utama RPJMN 2025–2029 yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak :

1. Prioritas Nasional 2 – Ekonomi Biru & Swasembada Pangan

Sasaran 2: *“Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)”*

Pada sasaran ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak berperan penting melalui:

- a) Pengembangan pangan akuatik atau “*blue food*” (nelayan & budidaya berskala regional);
- b) Penerapan ekonomi biru: penangkapan ikan terukur dan budidaya berkelanjutan.

2. Prioritas Nasional 3 – Infrastruktur & Industri Agromaritim

Sasaran 1: *“Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan”*

Pada sasaran ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak berperan penting melalui:

Penekanan pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja di sektor agromaritim, yang meliputi: penguatan sentra industri garam dan produk olahan laut, pengembangan industri transportasi laut, serta peningkatan kualitas SDM perikanan melalui pelatihan dan sertifikasi.

b. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rencana strategis kementerian Kelautan dan Perikanan disahkan melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Visi

Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan;
4. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan Berkualitas.

Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
3. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan Perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Kelautan dan perikanan;
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Adaptasi;
2. Perubahan Iklim;
3. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan perikanan;
4. Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
5. Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten;
6. Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

c. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan sebuah visi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan untuk tahun Tahun 2025 - 2029. Visi tersebut yaitu:

**“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN
UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam **misi pembangunan daerah** yaitu:

1. Meningkatkan **Layanan Dasar** yang Inklusif untuk mewujudkan **Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global**;
2. Meningkatkan **Pertumbuhan Perekonomian** Perkotaan dan Pedesaan Berbasis **Sektor Unggulan** yang **Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan**;
3. Mewujudkan **Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif** dengan mengedepankan nilai-nilai **Integritas**;
4. Mewujudkan **Pembangunan Infrastruktur** Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui **perencanaan tata ruang yang responsif**;
5. Menjaga **Stabilitas dan Kondusivitas Daerah** dengan **pendekatan budaya lokal**, serta menjamin **kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan**;

6. Menjaga **iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif** untuk membuka kesempatan kerja dan **berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah**. Serta **Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi**.

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun kedepan adalah “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” dengan Sasaran Daerah yaitu :

1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis dalam kerangka Jateng Sigap melalui Transformasi Tata Kelola;
2. Perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dalam kerangka Jateng Makmur melalui Transformasi Ekonomi;
3. Perwujudan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter dalam kerangka Jateng Nyaman melalui Transformasi Sosial. Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan, terhubung satu sama lain, dan bersifat cross cutting performance. Jawa Tengah maju dan berkelanjutan akan terwujud dilandasi dengan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis guna mendukung perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, dalam rangka mencapai kondisi sosial masyarakat yang lebih baik ditunjukkan dengan terwujudnya sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing dan berkarakter;

Dengan demikian, tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra yaitu “Meningkatkan pertumbuhan PDRB dan kualitas ekosistem kelautan dan perikanan” mempunyai keterkaitan dalam mendukung sasaran daerah yang kedua yaitu: “perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dalam kerangka Jateng Makmur melalui Transformasi Ekonomi.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembangunan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten 2011-2031 untuk kawasan perikanan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031

No.	Rencana Struktur Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
1	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pembangunan dan peningkatan dermaga	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Perhubungan - Dinas pariwisata - Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Jaringan Transportasi Laut	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kabupaten Demak	Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Perhubungan - Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kecamatan Bonang	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No.	Rencana Struktur Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Peningkatan Pelabuhan Perikanan	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Perwujudan Kawasan Perikanan	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan zona penangkapan ikan		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang - Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas Perhubungan - Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengembangan produksi perikanan tambak		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengembangan Pengolahan Rajungan, Kabupaten Demak		APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengembangan umkm pengolah hasil perikanan		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Perwujudan Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang	Peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

No.	Rencana Struktur Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Peningkatan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas pariwisata - Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Bonang	Pembangunan sarana penahan gelombang	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
			Penghijauan kawasan pantai	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan
			Rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan

Sumber: RTRW Kabupaten Demak 2011-2031

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah terkait Isu Strategis TPB Pilar Sosial.

Tabel 2.9.
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Tingkat kemiskinan yang masih tinggi	1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dan nelayan dalam hal IPTEK

Bahwa berdasarkan dokumen KLHS pada indikator TPB tidak ada yang menjadi wewenang Dinlutkan Kabupaten Demak

f. Telaahan Dokumen Lainnya

Tidak ada telaahan, analisis, atau dokumen perencanaan lainnya, seperti Renaksi, Rinduk, roadmap, blueprint, kajian konsultan, LSM, akademisi, atau pihak non-pemerintah, yang menjadi bagian atau acuan Renstra ini.

g. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak secara langsung berkontribusi membantu Bupati-Wakil Bupati dalam melaksanakan **Misi-2** “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas” dan **Misi-3** “Mengembangkan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal” pada tujuan “**Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan**”. Indikator yang diacu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak adalah Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan.

Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu produktif & mandiri, mantap dan tangguh & lestari

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Isu Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya (Tambak Tradisional dan Semi-Intensif) Kecamatan Sayung, Karangtengah, Wedung, Bonang	Belum optimalnya peningkatan kualitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan potensi sumberdaya ikan dan pesisir	Tingkat kemiskinan yang masih tinggi	Geopolitik dan Geoekonomi	Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	• Produksi & Daya Saing (Budidaya, Tangkap, dan Pasca-Panen)
Pengelolaan wilayah perairan pesisir utara Demak dengan hasil tangkapan seperti rajungan, ikan pelagis kecil, cumi, dan udang.						• Tata Kelola Ruang Laut & Pesisir • Lingkungan & Perubahan Iklim-Pesisir

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (kerupuk, abon, bandeng presto, olahan rajungan, dll). Wilayah aktif: Kecamatan Bonang, Wedung, Karangtengah dan Sayung.						• Kesejahteraan Nelayan & UMKM Pesisir • Kelembagaan, Data & Inovasi Layanan

Sumber: Analisis DINLUTKAN Kabupaten Demak, 2025

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan perekonomian sektor perikanan”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya;
3. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pertumbuhan PDB perikanan (ADHK)	Meningkatkan perekonomian sektor perikanan		Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan	%	5,66	5,67	5,68	5,70	5,72	5,74	5,76	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kelautan dan Perikanan	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	4,2	4,21	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	
			Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	79,26	79,3	80,04	80,1	80,15	80,2	80,25	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Ton	59.950	61.008,03	62.072,89	63.158,59	64.265,53	65.394,15	66.544,87	
		Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan	%	N/A	N/A	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40	

Sumber: Analisis Dinlutan Demak, 2025

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
- Pengembangan pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap yang berkelanjutan	- Peningkatan pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap yang berkelanjutan	- Pemantapan pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap yang berkelanjutan	- Percepatan pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap yang berkelanjutan	- Perwujudan pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap yang berkelanjutan
- Pengembangan pengelolaan budidaya yang berkelanjutan	- Peningkatan pengelolaan budidaya yang berkelanjutan	- Pemantapan pengelolaan budidaya yang berkelanjutan	- Percepatan pengelolaan budidaya yang berkelanjutan	- Perwujudan pengelolaan budidaya

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
- Pengembangan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan sesuai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	- Peningkatan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan sesuai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	- Pemantapan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan sesuai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	- Percepatan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan sesuai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	yang berkelanjutan - Perwujudan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan sesuai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Sumber: Analisis Dinlutkan Demak, 2025

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1.	Konsumsi ikan masyarakat	Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan	Mengoptimalkan dan memperkuat produksi perikanan budidaya dan tangkap. serta peningkatan mutu	1) Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan 2) Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			pengolahan hasil perikanan	3) Peningkatan infrastruktur perikanan 4) Memperkuat kelembagaan
2.	Indeks kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan	Memastikan pelaku usaha perikanan melakukan kegiatan usaha perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	1) Penyuluhan mengenai perikanan Berkelanjutan 2) Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan 3) Pengawasan secara berkala 4) Kolaborasi dengan akademisi dan pihak swasta
			Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi pengelolaan data dan informasi di sektor kelautan dan perikanan	1) Pembangunan infrastruktur digital 2) Pelatihan & Pendampingan pengelolaan data perikanan
3.		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi	Penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi pada pelaku usaha Perikanan	1) Peningkatan kapasitas penyuluh dan tenaga fungsional teknis 2) Pelatihan dan penyuluhan berbasis teknologi 3) Kemitraan dan Kolaborasi dengan akademisi dan pihak swasta

Sumber: Analisis Dinlutkan Demak, 2025

BAB 4

**PROGRAM, KEGIATAN,
SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA**

**PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati pada program prioritas produktif & mandiri, mantap dan tangguh & lestari. Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Produktif & Mandiri

Terdiri dari Kegiatan Prioritas

a. Bantuan Stimulan Produksi dan Pemasaran

Aksi Prioritas yang berupa:

- a) Pendataan dan Klasifikasi Penerima
- b) Bantuan Sarana Produksi & Alat Ringan
- c) Festival dan Expo Produk Lokal

- 2. Program Prioritas Mantab
 - Terdiri dari Kegiatan Prioritas
 - a. Pembangunan & Perbaikan Infrastruktur Penumpu Pangan
 - Aksi Prioritas yang berupa:
 - a) Pembangunan Jalan Usaha Tani & Tambak (JUT/JITUT)
- 3. Program Prioritas Tangguh & Lestari
 - Terdiri dari Kegiatan Prioritas
 - a. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Penguatan Komunitas
 - Aksi Prioritas yang berupa:
 - a) Penguatan Ekowisata dan Desa Wisata Mangrove

Secara terinci, dukungan terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4.1:

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tabel 4.1 Dukungan Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

NO	PP/KP	AP	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		PD	KET
					TAR GET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
4	Demak Produktif dan Mandiri															
1	Bantuan Stimulan Produksi dan Pemasaran		jumlah penerima bantuan stimulan produksi dan pemasaran	orang												
			Jumlah Benih ikan yang tersalurkan	ekor		-	200.000	50.000.000	1.116.500	235.000.000	1.143.750	240.000.000	1.176.000	245.000.000	Dinlutkan	
			Jumlah sarana usaha kelautan dan perikanan yang tersalurkan	paket			8	200.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	Dinlutkan	mesin perahu
			Jumlah Prasarana kelautan dan Perikanan Budidaya yang tersalurkan	unit		-	10	70.000.000	25	140.000.000	30	160.000.000	32	180.000.000	Dinlutkan	kolam, pompa, mesin perahu
			jumlah bantuan sarpras pengolahan yang tersalurkan	paket	2	330.000.000			2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	Dinlutkan	
5	Demak Mantap															
1	Pembangun an & Perbaikan Infrastruktur Penumpu Pangan		jumlah infrastruktur penumpu pangan yang direvitalisasi	km												
			jumlah pembangunan JUT (Akses hasil kelautan dan perikanan)	km	1,28	1.000.000.000	1,28	1.000.000.000	1,28	1.000.000.000	1,28	1.000.000.000	1,28	1.000.000.000	Dinlutkan	Untuk garam dan budidaya

Sumber: Analisis Dinlutkan Demak, 2025

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Selain melanjutkan program prioritas dari Bupati Demak, Dinas juga mengimplementasikan program pendelegasian dari Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan komitmen Provinsi sebagai **“motor ketahanan pangan”** menuju swasembada komoditas laut dan darat (padi, jagung, perikanan) pada tahun 2026. Melalui sinergi ini, Dinas Kelautan dan Perikanan menjaga kesinambungan Program Daerah sekaligus memperkuat Ketahanan Pangan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota	Data Awal 2024	Target										Target Kondisi Akhir RPJMD	Nomenklatur	
				2025		2026		2027		2028		2029			Kode	Subkegiatan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Prioritas Delegasi																
1	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	pelatihan dan pembinaan Budidaya Ikan Nila di Tambak dan bantuan bibit serta pakan ikan nila	N/A	4 Kelompok	100.000.000	4 Kelompok	100.000.000	5 kelompok	125.000.000	5 Kelompok	125.000.000	5 Kelompok	125.000.000	19	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Dukungan Pangan																

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota	Data Awal 2024	Target										Target Kondisi Akhir RPJMD	Nomenklatur	
				2025		2026		2027		2028		2029			Kode	Subkegiatan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	pelatihan dan pembinaan Budidaya Ikan Nila di Tambak dan bantuan bibit serta pakan ikan nila	N/A	4 Kelompok	100.000.000	4 Kelompok	100.000.000	5 kelompok	125.000.000	5 Kelompok	125.000.000	5 Kelompok	125.000.000	19	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan daycare untuk buruh di Kawasan Industri	-Penyiapan data dan rekomendasi kebutuhan pupuk bagi pembudidaya ikan yang membutuhkan -Penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu untuk nelayan dan penyiapan penerima bantuan subsidi solar	N/A	1	66.992.500	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	3.25.03.2.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Bantuan perbaikan sarana penangkapan ikan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan di laut	N/A	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000			Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota	Data Awal 2024	Target										Target Kondisi Akhir RPJMD	Nomenklatur	
				2025		2026		2027		2028		2029			Kode	Subkegiatan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Subsidi Pangan Murah	Pembukaan stand UMKM produk Perikanan yang disubsidi di pelaksanaan expo dan pasar murah	8	6	75.000.000	6	104.000.000	6	104.000.000	6	110.000.000	6	115.000.000	30	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5	Penyediaan benih yang berkualitas	Penyediaan benih dari induk bersertifikat	N/A	429.500 ekor	84.630.000	450.000 ekor	80.885.000	472.500 ekor	89.255.000	496.125 ekor	81.840.000	520.900 ekor	89.255.000		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Analisis Dinlutkan Demak, 2025

4.1.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak melaksanakan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan. Program, kegiatan dan subkegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Kepmendagri Nomor 900.1-2850 tahun 2025. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun. Program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (pijakan penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2030).

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tabel. 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2026-2030

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.279.832.108		8.996.460.617		8.843.555.412		8.591.121.154		9.139.162.554		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.279.832.108		8.996.460.617		8.843.555.412		8.591.121.154		9.139.162.554		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.459.832.108		5.552.460.617		5.541.555.412		5.549.121.154		5.675.162.554	
	Meningkatnya kepuasan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan	IKM Dinas Kelautan dan Perikanan (Dengan Satuan:Persen)	91,65	91,65	91,70		91,75		91,80		91,85		91,90		SEKRETARIS
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Dokumen)	2	8	9		15		15		15		15		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					5.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	3		3		3		3		3		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0		4		4		4		4		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.514.832.108		4.556.528.617		4.598.642.092		4.641.176.701		4.684.136.656	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.169.650.923		4.211.347.432		4.253.460.907		4.295.995.516		4.338.955.471	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	12	16	28		35		40		40		40		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					340.181.185		340.181.185		340.181.185		340.181.185		340.181.185	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	25	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		12		12		12		12		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5.000.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		5		5		5		5		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0		2		2		2		2		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000		200.000.000		150.000.000		175.000.000		210.000.000	
	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		100		100		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		50.000.000		0		25.000.000		35.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	45	0		50		0		50		50		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		175.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	45	45	50		50		50		50		50		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					235.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000	
	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	15	26	20		20		20		20		20		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	47	47		47		47		47		47		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	20	20	20		20		20		20		20		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	8	8	10		10		10		10		10		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0		4		4		4		4		KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	230	350	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		90.932.000		62.913.320		52.944.453		51.025.898	
	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	8	5		7		15		2		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		35.000.000		0		35.000.000		0	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0		1		0		1		0		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		0		5.000.000		0		0	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	51	0	0		0		10		0		0		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		55.932.000		32.913.320		17.944.453		26.025.898	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	3	5		6		3		1		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		0		25.000.000		0		25.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	0	0		0		2		0		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					130.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		145.000.000	
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	30	30	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					125.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		140.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.000.000		295.000.000		320.000.000		270.000.000		310.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	3	2	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		75.000.000		90.000.000		75.000.000		90.000.000		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	5	17	17		17		17		17		17		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				0		0		10.000.000		0		0		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		1		0		0		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				160.000.000		100.000.000		100.000.000		75.000.000		100.000.000		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	10	15	15		15		15		15		15		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	5	20	18		20		20		20		20		KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.160.000.000		1.214.250.000		1.049.000.000		1.004.000.000		1.191.750.000		
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:Ton)	9108	9134,97	9162,37		9189,86		9217,43		9245,08		9272,82		KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN KELAUTAN
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				635.000.000		514.250.000		449.000.000		504.000.000		491.750.000		
	Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pendampingan pada kelompok nelayan yang terlaksana dengan baik (Dengan Satuan:Paket)	63	95	43		45		47		51		54		SUBKORPENGEEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		SUBKORPENGEEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1		SUBKOR PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	SUBKORPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	177	75	8		8		4		4		4		SUBKORPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					460.000.000		314.250.000		249.000.000		304.000.000		291.750.000	SUBKORPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	24	20	27		25		20		24		34		SUBKORPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					175.000.000		300.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000	
	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan bina kelompok nelayan (Dengan Satuan:Kelompok)	50	35	40		40		40		40		40		SUBKORPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					100.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000	SUBKORPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	479	160	100		100		100		50		50		SUBKORPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil					75.000.000		100.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000	SUBKORPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Dengan Satuan:Kelompok)	0	4	4		4		4		2		2		SUBKOR PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					350.000.000		400.000.000		450.000.000		350.000.000		400.000.000	
	Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang tersedia (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		SUBKORPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					50.000.000		100.000.000		50.000.000		50.000.000		0	SUBKORPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
	Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	2		2		2		2		0		SUBKOR PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					300.000.000		300.000.000		400.000.000		300.000.000		400.000.000	SUBKORPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dengan Satuan:Layanan)	2	2	2		2		2		2		2		SUBKOR PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.330.000.000		1.245.500.000		1.344.000.000		1.074.000.000		1.310.500.000	
	Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (Dengan Satuan:Ton)	50.842	51.873,06	52.910,52		53.968,73		55.048,10		56.149,07		57.272,05		KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					613.000.000		570.000.000		600.000.000		470.000.000		565.500.000	
	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan bina kelompok pembudidaya (Dengan Satuan:Kelompok)	28	42	30		30		40		25		29		SUBKOR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil					68.000.000		70.000.000		100.000.000		70.000.000		75.000.000	SUBKOR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Dengan Satuan:Kelompok)	11	20	10		10		20		10		10		SUBKOR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					545.000.000		500.000.000		500.000.000		400.000.000		490.500.000	SUBKOR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Kelompok)	17	22	20		20		20		15		19		SUBKOR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					1.717.000.000		675.500.000		744.000.000		604.000.000		745.000.000	
	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana pembudidaya ikan yang tersedia (Dengan Satuan:Paket)	14	9	14		12		13		13		14		SUBKOR PEMBENIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN IKAN
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	SUBKOR PEMBENIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN IKAN

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		18		18		18		18		SUBKOR PEMBENIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN IKAN
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.380.000.000		500.500.000		490.000.000		429.000.000		470.000.000		SUBKOR PEMBENIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN IKAN
	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	9	4	8		7		7		8		8		SUBKOR PEMBENIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN IKAN
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				337.000.000		100.000.000		179.000.000		100.000.000		200.000.000		SUBKOR PEMBENIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN IKAN
	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	5	5	6		5		6		5		6		SUBKOR PEMBENIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN IKAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				60.000.000		70.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000		
	Meningkatnya kepatuhan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Dengan Satuan:Persen)	N/A	N/A	50		55		60		65		70		KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN KELAUTAN
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				60.000.000		70.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000		
	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	4		4		4		4		4		PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota					10.000.000		15.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000	PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA
	Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Dengan Satuan: Pelaku Usaha)	0	0	50		50		50		50		50		PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA
3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota					10.000.000		15.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000	PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA
	Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Dengan Satuan: Pelaku Usaha)	0	0	50		50		50		50		50		PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA
	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Dengan Satuan: Pelaku Usaha)	0	0	50		50		50		50		50		PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.270.000.000		914.250.000		849.000.000		904.000.000		891.750.000	
	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	produksi pengolahan hasil perikanan (Dengan Satuan: Ton)	22.010	22.520	23.420		24.380		25.403		26.495		27.660		KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					0		50.000.000		40.000.000		30.000.000		40.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah data dan informasi usaha pengolahan hasil perikanan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		2		2		2		2		S U B K O R PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PERIKANAN
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				0		50.000.000		40.000.000		30.000.000		40.000.000		S U B K O R PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PERIKANAN
	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		2		2		2		2		SUBKOR PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				250.000.000		189.250.000		159.000.000		150.000.000		200.000.000		
	Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poblhasar yang terbina pada produk olahan perikanan (Dengan Satuan:Orang)	80	80	70		50		40		40		50		S U B K O R PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PERIKANAN
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				250.000.000		189.250.000		159.000.000		150.000.000		200.000.000		S U B K O R PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PERIKANAN
	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Dengan Satuan:Unit Usaha)	40	80	70		50		40		40		50		SUBKOR PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PERIKANAN

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					1.020.000.000		675.000.000		650.000.000		724.000.000		651.750.000	
	Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebutuhan bahan baku ikan (Dengan Satuan:KG)	2006	1125	400		450		450		400		450		SUBKOR PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PERIKANAN
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		200.000.000		200.000.000		175.000.000		200.000.000	SUBKOR PEMASARAN DAN PROMOSI HASIL PERIKANAN
	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ton)	2,006	1,125	0,225		0,45		0,45		0,40		0,45		SUBKOR PEMASARAN DAN PROMOSI HASIL PERIKANAN
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					920.000.000		475.000.000		450.000.000		549.000.000		451.750.000	SUBKOR PEMASARAN DAN PROMOSI HASIL PERIKANAN
	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	100	100	30		30		30		30		30		SUBKOR PEMASARAN DAN PROMOSI HASIL PERIKANAN
			TOTAL:	10.279.832.108		8.996.460.617		8.843.555.412		8.591.121.154		9.139.162.554			

Sumber: Analisis Dinlutkan Demak, Aplikasi Corona Imen V4, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	4,2	4,21	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	
2	Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	79,26	79,3	80,04	80,1	80,15	80,2	80,25	
3	Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan	Persen	5,66	5,67	5,68	5,70	5,72	5,74	5,76	

Sumber: Analisis Dinlutkan Demak, 2025

Tabel. 4.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	102,85	100	100	100	100	100	100	Target Kumulatif dalam 5 Tahun sesuai dengan target jumlah produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya: Satuan Ton)

Sumber: Analisis Dinlutkan Demak, 2025



BAB 5

Perwutur

BAB V

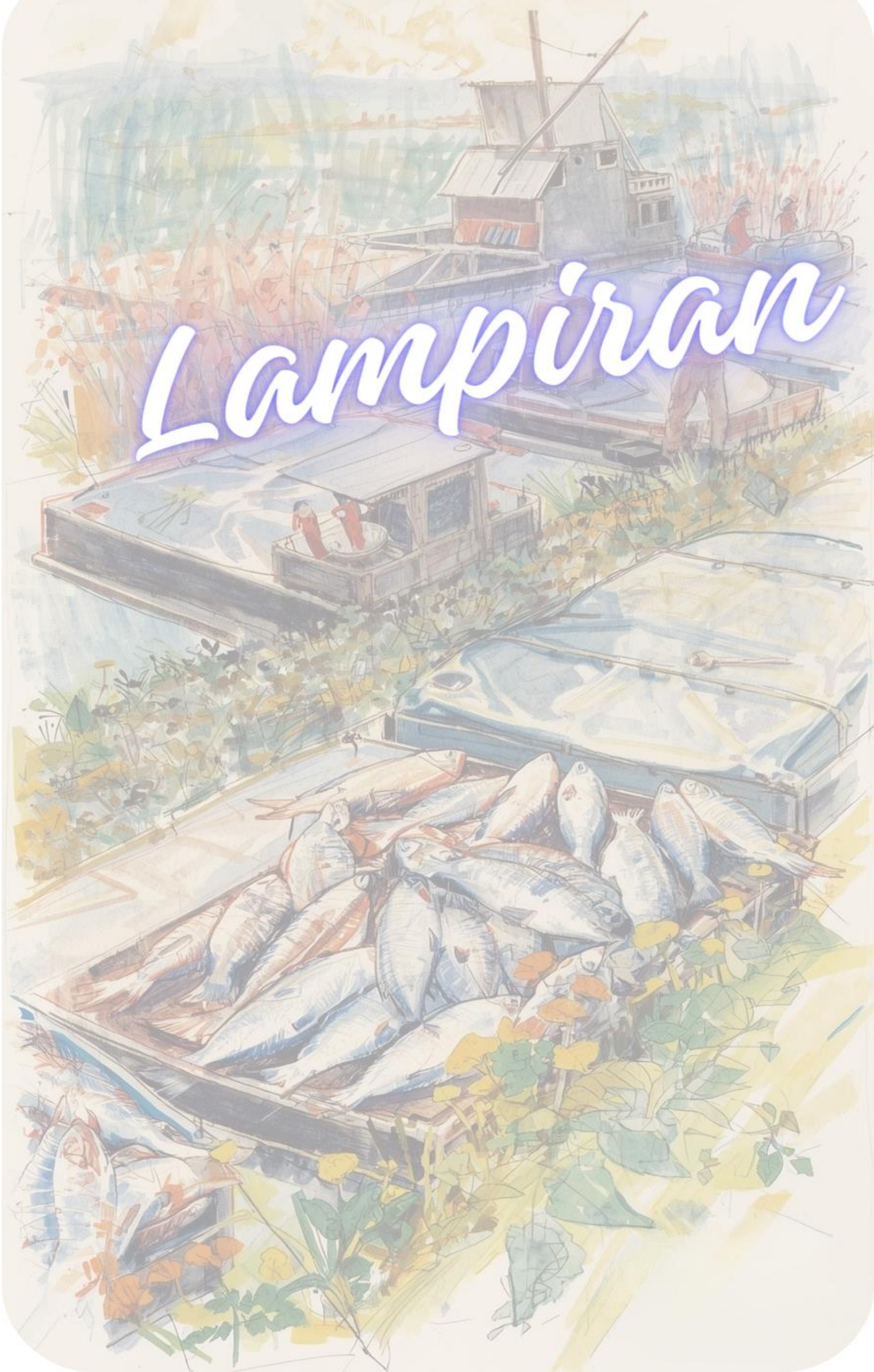
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan bidang Kelautan dan Perikanan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Permasalahan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak . Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perlu dilakukan pula penggalangan komitmen dan kerjasama dengan *stakeholder*, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, media maupun dunia usaha dalam melaksanakan Renstra ini. Semoga Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera.

Lampiran



**LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029**

Pada bagian ini dijabarkan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Setiap indikator dilengkapi dengan level indikator, nama indikator, satuan, definisi operasional, formulasi perhitungan, jadwal rilis, serta instansi perilis. Penjabaran masing-masing indikator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Definisi Operasional

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	TUJUAN 1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor perikanan	PE Subkategori Perikanan	Persen	Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada lapangan usaha perikanan	$LPE_{(n,i)} = \frac{PDRB_{(n,k,i)} - PDRB_{(n-1,k,i)}}{PDRB_{(n-1,k,i)}} \times 100$ LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi k = a.d.h. Konstan n = Tahun Berlaku i = Sektor/ subsektor	bulan Januari n + 1	BPS Kab. Demak
	SASARAN 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kelautan dan Perikanan	Nillai SAKIP Dinlutkan	Angka	Hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem	Nilai Hasil Evaluasi oleh APIP atas SAKIP Dinlutkan Kabupaten Demak pada tahun evaluasi	bulan Januari n + 1	Inspektorat Kab. Demak

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis																												
1	2	3	4	5	6	7	8																												
				Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	<table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th><th>Sub Komponen</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td><td>a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>25%</td><td>a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15%</td><td>a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja</td><td>10%</td><td>a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20%</td><td>a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td></td></tr></table>	No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)	Total		100%			
No	Komponen	Bobot	Sub Komponen																																
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).																																
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)																																
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)																																
4	Evaluasi Kinerja	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)																																
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (4%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (6%)																																
Total		100%																																	
		Indeks Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)	Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks Formulir-02 + 25% Nilai Indeks Formulir-03		Dinlutkan																												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	TRIWU LAN	Dinlutkan																												

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
				Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			
	KEGIATAN. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	Laporan	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja telah mengikuti alur proses yang telah diatur dan dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun ketentuan pemerintah daerah	Jumlah dokumen yang disusun sesuai tahapan dan waktu	TRIWULAN	Dinlutkan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang berhasil disusun oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan= $\sum$ (dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan)	Semester	Dinlutkan
	Koordinasi Dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah (RKA-SKPD) yang berhasil disusun serta jumlah	Jumlah Dokumen=(Jumlah RKA-SKPD yang disusun)+(Jumlah laporan hasil koordinasi yang disusun)	SEMESTER	Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen RKA-SKPD		laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen RKA-SKPD pada tahun berjalan.			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen perubahan perencanaan anggaran perangkat daerah (Perubahan RKA-SKPD) yang berhasil disusun serta jumlah laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen=(Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun)+(Jumlah laporan hasil koordinasi yang disusun)	SEMESTER	Dinlutkan
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang berhasil disusun serta jumlah laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan DPA-SKPD pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen=(Jumlah DPA-SKPD yang disusun)+(Jumlah laporan hasil koordinasi yang disusun)	SEMESTER	Dinlutkan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang berhasil disusun serta jumlah laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen=(Jumlah dokumen Perubahan DKA-SKPD yang disusun)+(Jumlah laporan hasil koordinasi yang disusun)	SEMESTER	Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah laporan kinerja yang berhasil disusun oleh SKPD serta jumlah laporan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan tersebut pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen=(Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD)+(Jumlah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)+(Jumlah Laporan Hasil Koordinasi yang disusun)	TRIWU LAN	Dinlutkan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berhasil disusun pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah= $\sum$ (Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun pada tahun berjalan)	SEMESTER	Dinlutkan
	KEGIATAN. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	Bulan	Jumlah bulan dalam satu tahun anggaran di mana perangkat daerah berhasil memenuhi kewajiban penyusunan administrasi keuangan (pembukuan, dokumen pertanggungjawaban, dan bukti transaksi) serta laporan keuangan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sesuai ketentuan	Tingkat Pemenuhan (bulan)= $\sum$ (bulan yang memenuhi penyusunan administrasi dan laporan keuangan sesuai ketentuan)	TRIWU LAN	Dinlutkan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/ Bulan	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN= $\sum$ (ASN pene	BULAN	Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gaji dan Tunjangan ASN		daerah yang menerima gaji pokok beserta tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu periode anggaran	rima gaji dan tunjangan pada periode tertentu)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah dokumen administrasi yang dihasilkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas ASN di perangkat daerah selama satu tahun	Jumlah Dokumen= $\sum$ (dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang diterbitkan selama tahun berjalan)	BULAN	Dinlutkan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen keuangan yang dihasilkan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan penatausahaan serta proses pengujian/verifikasi keuangan SKPD pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen= $\sum$ (dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang diterbitkan/disahkan selama tahun berjalan)		Dinlutkan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang berhasil disusun serta jumlah laporan hasil koordinasi yang dilakukan dalam rangka penyusunan laporan tersebut pada tahun berjalan	Jumlah Dokumen=(Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun)+(Jumlah Laporan Hasil Koordinasi yang disusun)		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	KEGIATAN. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	jumlah laporan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan disampaikan oleh perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga	Tingkat Pemenuhan (laporan)= $\sum$ (Jumlah laporan administrasi dan p engelolaan BMD yang disusun pa da tahun berjalan)		Dinlutkan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD= $\sum$ (Laporan penatausahaan BMD yang disusun SKPD dalam 1 tahun anggaran)		Dinlutkan
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun oleh SKPD dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah RKBMD SKPD= $\sum$ (Dokume n RKBMD yang disusun SKPD dal am 1 tahun anggaran)		Dinlutkan
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Laporan	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dihasilkan	Jumlah Laporan BMD= $\sum$ (Dokume n Rekonsiliasi + Laporan Penyusu nan BMD yang disusun SKPD dal am 1 tahun anggaran)		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Milik Daerah pada SKPD		SKPD dalam satu tahun anggaran			
	KEGIATAN. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Persen	Tingkat keterlaksanaan layanan administrasi kepegawaian yang meliputi pelayanan terkait pengelolaan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Layanan (%) = $\frac{\text{Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi}}{\text{Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diajukan/wajib dipenuhi}} \times 100\%$ Tingkat Pemenuhan Layanan (%) = $\frac{\text{Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi}}{\text{Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diajukan/wajib dipenuhi}} \times 100\%$		Dinlutkan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang berhasil diadakan oleh perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran sesuai dengan ketentuan dan standar kebutuhan pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas = Jumlah paket pakaian dinas lengkap dengan atribut kelengkapan yang berhasil diadakan dan didistribusikan kepada ASN		Dinlutkan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kompetensi jabatannya dalam rangka peningkatan kapasitas dan kinerja	Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat = $\sum$ Pegawai yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi serta dinyatakan lulus/selesai		Dinlutkan
	KEGIATAN. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan	Persen	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran yang	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran = $\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Mendapat L}}$		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
		layanan administrasi perkantoran		diberikan perangkat daerah kepada seluruh pegawainya	ayanan Administrasi Perkantoran /Jumlah Pegawai×100% $\text{Persentase Layanan Administrasi Perkantoran} = \frac{\text{Jumlah Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Perkantoran}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	jumlah paket pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan=Σ(Total Paket yang Disediakan dalam 1 Tahun)		Dinlutkan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan=Σ(Total Paket yang Tersedia dalam 1 Tahun)		Dinlutkan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah paket pengadaan peralatan rumah tangga kantor yang disediakan perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk mendukung kenyamanan, kebersihan, dan kelancaran operasional perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan=Σ(Total Paket yang Tersedia dalam 1 Tahun)		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah paket pengadaan barang cetak dan jasa penggandaan yang disediakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan = $\sum(\text{Total Paket Cetak dan Penggandaan yang Tersedia dalam 1 Tahun})$		Dinlutkan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari kegiatan fasilitasi kunjungan tamu di lingkungan perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu = $\sum(\text{Total Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disusun dalam 1 Tahun})$		Dinlutkan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan resmi yang dihasilkan dari kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam satu tahun anggaran	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD = $\sum(\text{Total Laporan yang Disusun dalam 1 Tahun})$		Dinlutkan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis (arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan administrasi SKPD serta disimpan dalam jangka waktu tertentu) yang dihasilkan oleh SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD = $\sum(\text{Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis yang Disusun dalam 1 Tahun})$		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
				dalam satu tahun anggaran			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen yang dihasilkan SKPD dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada satu tahun anggaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD= $\sum$ (Dokumen Dukungan SPBE yang Disusun dalam 1 Tahun)		Dinlutkan
	KEGIATAN. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Unit	Tingkat keterpenuhan kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (seluruh barang berwujud yang dibeli/diadakan dan digunakan sebagai sarana pendukung tugas dan fungsi perangkat daerah) dalam satu tahun anggaran	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah = $\sum$ (pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran)		Dinlutkan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Banyaknya kendaraan dinas operasional atau lapangan (kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat (atau jenis lain sesuai kebutuhan) yang digunakan untuk	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan= $\sum$ (Unit kendaraan yang berhasil disediakan)		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
				mendukung mobilitas, pelaksanaan tugas, dan operasional lapangan perangkat daerah) yang berhasil disediakan melalui kegiatan pengadaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam satu periode anggaran			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Banyaknya paket mebel (kumpulan barang perabotan yang terdiri dari meja, kursi, lemari, rak, atau jenis mebel lain sesuai spesifikasi kebutuhan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pengadaan) yang berhasil disediakan melalui kegiatan pengadaan pada SKPD dalam satu periode anggaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan= $\sum$ (Paket Mebel yang berhasil disediakan)		Dinlutkan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	banyaknya unit peralatan dan mesin lainnya (sarana pendukung operasional yang termasuk kategori aset tetap peralatan dan mesin sesuai klasifikasi Barang Milik Daerah (BMD)) yang berhasil disediakan melalui	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
				kegiatan pengadaan pada SKPD dalam satu periode anggaran			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Banyaknya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (seluruh fasilitas penunjang yang melekat pada gedung kantor maupun bangunan lain milik pemerintah daerah) yang berhasil disediakan melalui kegiatan pengadaan dalam satu periode anggaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana a Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan= $\sum$ (Unit Sarana/Prasarana yang diterima sesuai BAST)		Dinlutkan
	KEGIATAN. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan	Persen	Tingkat keterpenuhan kebutuhan jasa penunjang (meliputi berbagai layanan penunjang) urusan pemerintahan daerah yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam satu periode anggaran	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) = $\frac{\text{Jumlah Jasa Penunjang yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Jasa Penunjang yang Direncanakan}} \times 100\%$		Dinlutkan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan dari kegiatan penyediaan jasa surat menyurat (aktivitas pengelolaan surat masuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat= $\sum$ Laporan yang Dihasilkan dan Disahkan dalam 1 Tahun		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan surat keluar, termasuk pencatatan, distribusi, pengiriman, dan pendokumentasian surat dinas, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) pada SKPD dalam satu periode anggaran			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (Pembayaran tagihan telepon, internet, penyediaan jasa air bersih, jasa listrik) pada SKPD dalam satu periode anggaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa = $\sum$ Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik yang Disahkan dalam 1 Tahun		Dinlutkan
	KEGIATAN. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	Tingkat keberhasilan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah dengan melihat jumlah BMD yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan total BMD yang dikelola	Persentase BMD dalam Kondisi Baik = $\frac{\text{Jumlah BMD dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Jumlah BMD}} \times 100\%$		Dinlutkan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan	Unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		kendaraan dinas jabatan (Kendaraan bermotor yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) dan digunakan oleh pejabat/pegawai sesuai ketentuan) yang mendapatkan layanan pemeliharaan rutin/berkala dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam periode tahun berjalan	$=\sum(\text{Unit Kendaraan Dinas yang Di pelihara dan Dibayarkan Pajaknya})$		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kendaraan bermotor yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) dan digunakan oleh pejabat/pegawai sesuai ketentuan) yang mendapatkan layanan pemeliharaan rutin/berkala dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam periode tahun berjalan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Di pelihara dan Dibayarkan Pajaknya $=\sum(\text{Unit Kendaraan Dinas yang Di pelihara dan Dibayarkan Pajaknya})$		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Jumlah mebel/ perabot kantor yang dilakukan pemeliharaan pada periode tertentu agar mebel tetap dalam kondisi baik, layak pakai, dan mendukung kelancaran pelayanan perkantoran.	Jumlah Mebel yang Dipelihara= $\sum$ (Unit Mebel yang Mendapat Pemeliharaan)		Dinlutkan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dilakukan kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi pada tahun berjalan	Jumlah Gedung/Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi= $\sum$ (Unit Gedung/Bangunan yang Telah Selesai Dipelihara/Direhabilitasi)		Dinlutkan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	jumlah sarana dan prasarana penunjang pada gedung kantor atau bangunan lainnya (fasilitas penunjang gedung/bangunan) yang dilakukan pemeliharaan atau rehabilitasi pada tahun berjalan	Jumlah Sarana/Prasarana yang Dipelihara/Direhabilitasi= $\sum$ (Unit Sarana/Prasarana yang Selesai Dipelihara/Direhabilitasi)		Dinlutkan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana dan prasarana pendukung dari gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan atau rehabilitasi pada tahun berjalan	Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung yang Dipelihara/Direhabilitasi= $\sum$ (Unit Sarana/Prasarana Pendukung yang Selesai Dipelihara/Direhabilitasi)		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN 2. Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap dan budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten dengan sumber data utama menggunakan One Data KKP dalam satuan ton.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap + Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		Dinlutkan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	Jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan melalui kegiatan penangkapan di laut, perairan umum daratan (sungai, danau, waduk, rawa), dan perairan lainnya dalam periode satu tahun	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di laut (pelabuhan+non pelabuhan) dan perikanan umum daratan (PUD)		Dinlutkan
	KEGIATAN. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pendampingan pada kelompok nelayan yang terlaksana dengan baik	Paket	Jumlah paket kegiatan pendampingan yang diberikan kepada kelompok nelayan perairan darat (sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya) yang terlaksana sesuai rencana	Jumlah Pendampingan= $\sum$ (Paket P endampingan yang Terealisasi dan Terverifikasi)		Dinlutkan
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu	Dokumen	Jumlah dokumen resmi yang memuat data dan informasi mengenai potensi, jenis, sebaran, dan kondisi sumber daya ikan di perairan darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan= $\sum$ (Dokumen Data dan Informasi yang Tersedia dan Terverifikasi)		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kabupaten/Kota yang Tersedia		(sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya) dalam lingkup satu kabupaten/kota, yang disusun, diverifikasi, dan disahkan oleh instansi berwenang			
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	Jumlah unit prasarana yang disediakan untuk mendukung kegiatan usaha perikanan tangkap dalam satu kabupaten/kota.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia= $\sum$ (Unit Prasarana yang Disediakan dan Siap Digunakan)		Dinlutkan
	Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	Jumlah sarana yang disediakan dan terjamin ketersediaannya untuk menunjang kegiatan usaha perikanan tangkap di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia= $\sum$ (Unit Sarana yang Disediakan, Layak, dan Siap Digunakan)		Dinlutkan
	KEGIATAN. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	jumlah kelompok nelayan kecil yang mendapatkan kegiatan pembinaan, pendampingan, atau fasilitasi dari pemerintah daerah melalui program/kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam satu tahun anggaran	Cakupan Bina Kelompok Nelayan = $\sum$ (Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Dibina)		Dinlutkan
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang	Orang	Total individu nelayan kecil yang telah mengikuti	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya= $\sum$ (Nelayan Kecil		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkat Kapasitasnya		program peningkatan kapasitas berupa pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, atau kegiatan pengembangan usaha yang difasilitasi oleh dinas dalam satu tahun anggaran dan dinyatakan memperoleh peningkatan pengetahuan/kemampuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan	1 yang Memenuhi Kriteria Peningkatan Kapasitas)		
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	total kelompok nelayan kecil yang mendapatkan dukungan, pendampingan, atau fasilitasi dari pemerintah daerah dalam rangka pembentukan kelembagaan baru (kelompok nelayan kecil yang sah dan memiliki legalitas/AD-ART sesuai ketentuan), atau Pengembangan kelembagaan yang sudah ada (melalui pelatihan manajemen organisasi, fasilitasi perizinan, penyusunan rencana kerja kelompok, penguatan administrasi, maupun	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi= $\sum$ (Kelompok Nelayan Kecil yang Mendapat Fasilitasi Pembentukan atau Pengembangan Kelembagaan)		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
				pendampingan dalam mengakses program bantuan).			
	KEGIATAN. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang tersedia	Unit	Banyaknya TPI yang disediakan, atau difungsikan oleh pemerintah daerah maupun kerja sama pihak lain yang dapat digunakan untuk kegiatan pelelangan ikan di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran	Jumlah TPI yang tersedia (unit)= $\sum$ TPI tersedia pada tahun berjalan		Dinlutkan
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	Banyaknya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun, ditetapkan secara resmi, dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan serta penyelenggaraan TPI di wilayah kabupaten/kota pada satu tahun anggaran	Jumlah SOP TPI (dokumen)= $\sum$ SOP TPI yang ditetapkan pada tahun berjalan		Dinlutkan
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	Banyaknya layanan yang diberikan kepada pengguna (nelayan, pedagang, pembeli, atau pihak terkait lainnya) dalam proses operasional	Jumlah Layanan TPI (layanan)= $\sum$ Layanan TPI yang terlaksana pada tahun berjalan		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
				penyelenggaraan TPI pada satu tahun anggaran			
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Persen	Ukuran tingkat kepatuhan pelaku usaha (perikanan tangkap, budidaya, pengolahan) dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan	$\text{Persentase Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi}} \times 100\%$		Dinlutkan
	KEGIATAN. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	Banyaknya dokumen berupa laporan tertulis hasil kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan darat (sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya) dalam satu tahun anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan (dokumen)= $\sum$ Dokumen hasil pengawasan yang tersedia pada tahun berjalan		Dinlutkan
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai	Pelaku usaha	Banyaknya pelaku usaha perikanan budidaya (perorangan, kelompok, atau badan usaha) yang dilakukan pemeriksaan secara langsung/administratif untuk memastikan	Jumlah Pelaku Usaha yang Diperiksa= $\sum$ Pelaku Usaha Budidaya yang diperiksa kepatuhannya		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
		kewenangan kabupaten/kota		kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, teknis budidaya, lingkungan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	Banyaknya pelaku usaha (perorangan, kelompok, koperasi, atau badan usaha) di bidang pemasaran hasil perikanan dan/atau pengolahan hasil perikanan yang dilakukan pemeriksaan/monitoring untuk menilai kepatuhan terhadap Persyaratan legalitas usaha (izin usaha, NIB, sertifikasi bila ada), standar mutu dan keamanan pangan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi = $\sum$ Pelaku Usaha Pemasaran/Pengolahan yang diperiksa		Dinlutkan
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	Banyaknya pelaku usaha (nelayan, kelompok nelayan, koperasi, atau badan usaha) yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di wilayah kewenangan kabupaten/kota yang	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi = $\sum$ Pelaku Usaha Penangkapan atau Pengangkutan yang diperiksa		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
				dilakukan pengawasan/pemeriksaan untuk menilai kepatuhan terhadap Perizinan usaha (Pas kapal/Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK), NIB), ketentuan alat tangkap serta peraturan perundang-undangan lain di bidang perikanan.			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah total hasil panen ikan, udang, rumput laut, dan biota perairan lainnya yang dibudidayakan melalui kegiatan perikanan budidaya (air tawar, payau, laut) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun	Produksi Perikanan Budidaya= $\sum$ Produksi Budidaya per Komoditas (ton)		Dinlutkan
	KEGIATAN. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan bina kelompok pembudidaya	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pembinaan, pendampingan, pelatihan, fasilitasi kelembagaan, maupun pemberdayaan dalam 1 (satu) tahun anggaran.	Cakupan Bina Kelompok Pembudi daya= $\sum$ Kelompok Pembudidaya yang Dibina		Dinlutkan
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti	Kelompok	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang tercatat mengikuti kegiatan peningkatan	Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas= $\sum$ Kelompok Pembudi Daya yang Terdaftar dan Hadir		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengembangan Kapasitas		kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.			
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	jumlah kelompok usaha pembudidaya ikan (pokdakan) yang secara resmi tercatat mendapatkan layanan program pemerintah daerah, meliputi Pendampingan (bimbingan teknis, konsultasi dan teknis budidaya ikan), pendidikan dan pelatihan (bimtek, pelatihan) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan dalam aspek teknis maupun manajerial.	Jumlah Kelompok Usaha Terlayani = $\sum$ Kelompok Budidaya yang Mendapatkan Layanan		Dinlutkan
	KEGIATAN. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana pembudidaya ikan yang tersedia	Paket	Jumlah paket bantuan/penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kegiatan pembudidayaan ikan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.	Jumlah Paket Sarpras Tersedia = $\sum$ Paket Sarpras Budidaya yang Disediakan dan Tersalurkan		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen resmi yang memuat data dan informasi terkait kegiatan pembudidayaan ikan di wilayah Kabupaten Demak yang dihimpun, dikelola, dan dipublikasikan oleh Dinas dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.	Jumlah Dokumen Data & Informasi = $\sum$ Dokumen Data & Informasi Pembudidayaan Ikan yang Disusun dan Tersedia		Dinlutkan
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah unit sarana fisik yang disediakan/dibangunkan/diperbaiki oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan pembudidayaan ikan di wilayah Kabupaten Demak dalam satu tahun anggaran	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan = $\sum$ Unit Prasarana yang Disediakan dan Siap Digunakan		Dinlutkan
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	jumlah unit sarana (Benih ikan, pakan ikan, obat-obatan, jaring, ember, dll) yang disediakan/dipenuhi/dijamin ketersediaannya oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pembudidayaan ikan di wilayah Kabupaten Demak dalam satu tahun anggaran.	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan = $\sum$ Unit Sarana yang Tersedia dan Siap Digunakan		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	SASARAN 3.Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan	Persen	Persentase kenaikan jumlah produksi hasil olahan perikanan dalam satu periode tertentu (tahunan), dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang dihitung berdasarkan volume produksi (ton) sesuai data hasil pengolahan perikanan di wilayah kabupaten.	$\frac{(\text{Produksi Tahun Berjalan} - \text{Produksi Tahun Sebelumnya})}{\text{Produksi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$ Pertumbuhan Produksi (%)=(Produksi Tahun Berjalan-Produksi Tahun Sebelumnya)/Produksi Tahun Sebelumnya×100%		Dinlutkan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	produksi pengolahan hasil perikanan	Ton	Jumlah volume hasil produk olahan perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan (UPI), kelompok usaha, maupun industri rumah tangga pengolahan perikanan dalam satu tahun di wilayah Kabupaten Demak.	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan = $\sum$ Volume Produksi Olahan Perikanan		Dinlutkan
	KEGIATAN. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah data dan informasi usaha pengolahan hasil perikanan	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat identitas, profil usaha, kapasitas produksi, jenis produk olahan, serta legalitas usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil yang diterbitkan oleh dinas dalam satu tahun anggaran	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan Ikan = $\sum$ Dokumen Data atau Informasi Usaha Pengolahan Ikan		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Dokumen resmi yang memuat identitas, klasifikasi skala usaha (mikro, kecil, menengah, besar) serta kategori tingkat risiko (rendah, menengah, tinggi) dari unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang ada dalam wilayah Kabupaten Demak, yang dihimpun, diverifikasi, dan disahkan oleh Dinas dalam satu tahun anggaran	Jumlah Data dan Informasi Usaha (dokumen)= $\sum$ Dokumen Data atau Informasi Usaha		Dinlutkan
	KEGIATAN. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pohlhasar yang terbina pada produk olahan perikanan	Orang	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam periode satu tahun anggaran	Jumlah= $\sum$ peserta pembinaan yang terdaftar dan tervalidasi		Dinlutkan
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan	Unit Usaha	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (skala mikro, kecil, menengah, dan besar sesuai klasifikasi risiko usaha) yang	Jumlah= $\sum$ Unit Usaha Peserta Pembinaan yang tervalidasi dan tercatat		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
		terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		memperoleh pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka penerapan persyaratan perizinan berusaha dalam periode satu tahun anggaran			
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebutuhan bahan baku ikan	KG	Total volume ikan (ikan segar atau produk perikanan primer lainnya) yang dibutuhkan oleh industri/usaha pengolahan ikan skala mikro, kecil, menengah, maupun besar di Kabupaten Demak yang digunakan langsung oleh industri/usaha pengolahan untuk menghasilkan produk olahan dalam periode satu tahun	Jumlah Kebutuhan Bahan Baku I kan= $\sum$ Volume kebutuhan bahan b aku ikan dari unit usaha pengolahan ikan		Dinlutkan
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu)	Ton	Total volume ikan yang dapat digunakan untuk konsumsi langsung masyarakat maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan ikan dalam periode satu tahun	Jumlah ketersediaan ikan= $\sum$ Volume ikan untuk konsumsi langsung masyarakat maupun sebagai bahan baku usaha pengolahan ikan		Dinlutkan

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
		Daerah Kabupaten/Kota					
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku usaha	Total individu/kelompok usaha pengolahan hasil perikanan dengan kategori skala mikro atau kecil sesuai peraturan perundangan, yang mendapatkan minimal satu bentuk fasilitasi (Bantuan sarana/prasarana pengolahan, Pendampingan teknis atau Fasilitasi pemasaran) dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam periode 1 tahun	Jumlah Pelaku Usaha Terfasilitasi =Σpelaku usaha yang terfasilitasi sesuai kriteria		Dinlutkan

Rencana



STRATEGIS
2025-2029